

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, serta pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, dan pendidikan anggota keluarganya.

Salah satu strategi yang perlu ditempuh adalah melalui pemberdayaan masyarakat secara optimal sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dengan menumbuhkan etos kerja dan mental kewirausahaan yang tangguh, serta ditunjang secara kreatif oleh tersediannya kelembagaan ekonomi yang memadai, terutama pada ekonomi *mikro* yang telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis ekonomi melanda Indonesia. Oleh karena itu, usaha *mikro* merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap *Produk Domestik Bruto* (PDB) Indonesia yang meningkat dari tahun 2006 sampai 2007. Berdasarkan hasil *survey* dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2006 tercatat sebesar 53,3% dan pada tahun 2007 kontribusinya meningkat menjadi 53,6%. Perbandingan komposisi PDB menurut kelompok usaha pada tahun 2006 dan 2007 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Komposisi PDB menurut Kelompok Usaha pada Tahun 2006 dan 2007.

No.	Skala Usaha	2006	2007	Pertumbuhan
1.	Usaha Mikro & Kecil	1.778,7 (53,3%)	2.121,3 (53,6%)	+ 6,4%
2.	Usaha Besar	1559.5 (46,7)	1836.1 (46.4)	- 0,2%
		3.338,2 (100%)	3.957,4 (100%)	+ 6,3%

Sumber : BPS dan Kementerian Koperasi & UKM (diolah)

Pertumbuhan PDB UMKM tahun 2006 terjadi di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 8,2%, diikuti sektor jasa-jasa 8,1%, sektor pertambangan dan galian sebesar 7,9%, dan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian sebesar 3,1%. Sementara itu, pertumbuhan PDB UMKM 2007 terjadi pada semua sektor ekonomi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan sebesar 9,3%, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran 8,5%, dan sektor pertambangan serta galian sebesar 7,8% (BPS dan Kementrian Koperasi&UMKM, 2007).

Jumlah populasi UMKM pada tahun 2006 mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah angkatan

kerjanya mencapai 85,4 juta orang atau 96,18% terhadap seluruh angkatan kerja Indonesia. Untuk 2007, jumlah populasi UMKM mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah angkatan kerja mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh angkatan kerja Indonesia (BPS dan Kementrian Koperasi&UMKM, 2007).

Mengingat perannya dalam pembangunan, usaha *mikro* harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling membantu, saling memperkuat antara usaha *mikro*, kecil, dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan iklim usaha.

Beberapa bukti empiris telah menunjukkan, salah satunya adalah hasil penelitian dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa kesejahteraan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan ekonominya. Sementara itu perkembangan ekonomi ditentukan oleh sejauh mana penduduk negara tersebut mempunyai *spirit* berwirausaha (Martowijoyo, 2000).

Namun, pada perkembangannya usaha *mikro* banyak mendapati rintangan dalam pelaksanaan usahanya, masalah pokok yang dihadapi secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, bagi usaha *mikro* dengan pemasukan kurang dari Rp 50 juta, umumnya tantangan yang dihadapi ialah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi pengusaha, umumnya asal dapat

berjalan dengan aman dan baik sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal besar untuk *ekspansi* produksi, biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cashflow* saja. Bisa dipahami bila kreditor dan BPR-BPR (Bank Perkreditan Rakyat) maupun TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam–KUD) sangat membantu modal kerja mereka (Dipta, 2001).

*Kedua*, bagi usaha *mikro* dengan pemasukan antara Rp 50 juta hingga 2 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih *kompleks*. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil jenis ini adalah (Dipta, 2001) :

- a. Masalah *akses* terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/*grup* bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
- b. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku berkualitas baik.
- c. Masalah perbaikan kualitas barang dan *efisiensi* terutama bagi yang sudah menggarap pasar *ekspor* karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai oleh perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti.
- d. Masalah tenaga kerja, karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Mencermati uraian di atas terutama mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha *mikro* memang tidak dapat terpisahkan dari persoalan-persoalan pembentuk *capital* (permodalan) yang di dalamnya terdapat persoalan kredit dan manajemen keuangan. Meskipun permodalan bukan satu-satunya persoalan

terpenting yang dihadapi usaha *mikro*, namun permodalan merupakan salah satu unsur *vital* dalam mendukung peningkatan *produktivitas*, taraf hidup, dan pendapatan usaha *mikro*.

Meskipun sampai saat ini sudah cukup banyak model *financial* yang diimplementasikan dan diproyeksikan untuk pengembangan usaha *mikro*, baik yang dilakukan lembaga *formal* (perbankan) maupun *informal* (termasuk yang dilakukan LSM), persoalan modal tetap merupakan persoalan penting yang dihadapi usaha *mikro*. Ironisnya persoalan modal dalam pengembangan usaha *mikro* justru muncul seiring dengan kesulitan di pihak perbankan dalam penyaluran kreditnya.

Selain permodalan, masalah yang dihadapi oleh usaha mikro adalah masalah *manajemen*. Terutama sekali adalah ketidakmampuan pengusaha mikro menentukan pola *manajemen* yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya. Hal ini penting karena setiap periode tahap perkembangan usaha akan menuntut tingkat pengelolaan usaha yang berbeda. Pada awal perkembangan usaha atau skala usaha masih relatif kecil, gaya *manajemen* keluarga dan sederhana (*manajemen konvensional*) yang mengarah kepada pemusatan pengelolaan seorang (*one man show*) mungkin masih relevan (Dipta, 2001).

Namun sejalan dengan perkembangan lingkungan usaha (*intern* dan *ekstern*), gaya *manajemen konvensional* tidak dapat dipaksakan lagi, karena hal tersebut dapat menjadi pangkal munculnya berbagai persoalan baru. Dengan kata lain, pengusaha dituntut untuk selalu dinamis dalam menerapkan *manajemen* yang

sesuai dengan perkembangan usaha. Namun, tuntutan ini hanya dapat dilakukan jika para pengusaha *mikro* memiliki kemampuan dan keterampilan (*managerial skill*) yang memadai pula.

Permasalahannya adalah, *managerial skill* pengusaha *mikro* pada umumnya lemah. Akibatnya, gaya dan pola *manajemen* yang diterapkan oleh pengusaha *mikro* kurang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan usaha, atau mungkin juga karena pengusaha *mikro* belum mampu menyusun prioritas langkah yang harus dilakukan untuk pengembangan *manajemennya* (Dipta, 2001).

Hal lain, karena pengusaha *mikro* belum mampu memperhitungkan azas manfaat dan biaya dari perubahan dan penerapan *manajemen* yang sesuai. Kenyataan yang sering muncul adalah, pengusaha tidak mau melakukan pembagian tugas dalam bentuk pengadministrasian yang baik hanya karena alasan biaya tanpa memperhitungkan seberapa besar manfaat yang dapat dinikmatinya.

Misalnya dalam masalah *manajemen* sumberdaya manusia. Pengusaha *mikro* sering tidak mampu menerapkan *job description* yang jelas, bahkan sering mengarah kepada *one man show*. Hal ini pada tingkat tertentu dapat mengganggu kelancaran usaha, menurunkan pemasukan, serta mengakibatkan lepasnya kesempatan meraih peluang-peluang pasar, karena bagaimanapun, kemampuan seorang individu sangatlah terbatas, baik energi, waktu maupun pikiran (Dipta, 2001).

Demikian pula dalam persoalan *manajemen* keuangan, pengusaha *mikro* umumnya belum mampu melakukan pemisahan *manajemen* keuangan perusahaan dan

keuangan rumahtangga. Kondisi ini mengakibatkan pengusaha *mikro* sulit melakukan perhitungan-perhitungan dan pencatatan kegiatan usaha sehingga hasilnya tidak akurat. Pada gilirannya akan menghambat proses pembentukan modal usaha untuk menunjang pengembangan usahanya.

Akibatnya, pada saat usahanya harus berhubungan dengan pihak luar, misalnya pengajuan kredit, tidak dapat ditunjukkan data perkembangan usahanya. Walaupun pengusaha sudah melakukan pencatatannya, tetapi seringkali tidak sesuai dengan sistem pencatatan standar. Selain permodalan dan *manajemen*, pemasaran adalah masalah mendasar yang juga dihadapi oleh pengusaha *mikro*. Masalah di bidang pemasaran yang dihadapi pengusaha *mikro* pada umumnya terfokus pada tiga hal (Hafidz, 1987):

- a. Masalah persaingan pasar dan produk.
- b. Masalah akses terhadap informasi pasar.
- c. Masalah kelembagaan pendukung.

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, dapat dipahami bahwa persoalan modal bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan persoalan-persoalan lain yang juga sama pentingnya bagi pengusaha *mikro*, seperti persoalan *manajemen*. Artinya bahwa pemecahan persoalan modal harus dikaitkan dengan pemecahan persoalan lain yang dihadapi dalam usaha *mikro*.

Dalam konteks ini koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat sebagai pengambil kebijakan, pembina, dan pihak yang memberikan penguatan kepada usaha *mikro* menjadi penting. Koordinasi di sini berarti semacam pembagian tugas yang *spesifik* antar aktor pendukung, sekaligus berusaha menciptakan suatu

*mekanisme* arus informasi yang *sinergis* (Hutomo, 2000). Selain itu, diperlukan upaya untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antar pengusaha *mikro* yang kesulitan mendapatkan modal dengan pihak lembaga keuangan yang memiliki kesulitan menyalurkan modal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba melibatkan pengusaha *mikro*, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal perumusan skema kredit, termasuk prosedur penyaluran kredit yang diproyeksikan untuk usaha *mikro* (Hutomo, 2000).

Dengan kata lain, diperlukan upaya dan kehadiran aktor untuk menjembatani *gap* antara pengusaha *mikro* yang kesulitan mendapatkan modal dengan pihak lembaga keuangan yang kesulitan dalam menyalurkan modal. Hadirnya aktor dan skema bersama akan menyebabkan posisi pengusaha *mikro* meningkat dari hanya sekedar “obyek” menjadi “subyek” dalam perumusan dan penyaluran kredit untuk usaha *mikro*. Dalam konteks ini menjadi penting untuk mengubah orientasi pembuatan kebijakan publik kearah yang lebih *partisipatif* dan *transparan*, baik di tingkat perumusan maupun implementasi kebijakan.

Upaya untuk mengatasi masalah di bidang *manajemen* sebetulnya sudah banyak dilakukan, antara lain melalui pelatihan dari berbagai *instansi* terkait. Namun, upaya tersebut dirasakan masih harus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu mengatasi masalah yang mendasar tersebut. Bentuk dan materi pelatihan juga harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan usaha *mikro*.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya pelatihan dikoordinasikan secara baik antara pelaksana dengan pengusaha *mikro*, sehingga bentuk maupun materi pelatihan dapat *relevan* dengan kebutuhan. Sebagai contoh, misalnya dalam



membuat *spesifikasi* materi serta bentuk pelatihan, hendaknya disertai pembimbing lapangan yang dapat langsung diaplikasikan.

Dalam hal ini pemerintah melalui departemen terkait sudah cukup memberikan perhatian sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap usaha *mikro* yang semakin besar dan semakin *kongkrit*. Dengan adanya keberpihakan ini, usaha *mikro* diharapkan dapat berkembang dan mampu memenuhi harapan Pemerintah sebagai sektor ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan juga *devisa* negara melalui *ekspor* produk usaha *mikro*.

Namun di dalam hubungan yang terjalin antara pemerintah (Perbankan) dengan UMKM, juga terjadi persoalan lain. Permasalahan yang dihadapi antara lain, masalah belum dipunyainya sistem *administrasi* keuangan dan *manajemen* yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, kemudian masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal *ventura*, karena kebanyakan pengusaha *mikro* berhadapan dengan belitan *prosedur* guna mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga yang dinilai terlalu tinggi, kemudian sifat tertutup dari UMKM kepada para pemberi pinjaman (BPR) dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan dana yang diberikan tidak bersifat *produktif*. Masalah selanjutnya adalah dalam hal kurang mampunya menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat (*Sudarmono dan Fransisco, 2008*).

Melihat permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut maka strategi pemberdayaan harus diarahkan oleh pemerintah untuk memperkuat aspek-aspek berikut (Sugiyanto, 2006):

1. Aspek *Manajerial*, yang meliputi peningkatan *produktivitas/omzet*, tingkat *utilitas*, tingkat hunian, peningkatan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20 persen dari *portfolio* kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).
3. Mengembangkan program kemitraan usaha dengan usaha besar baik melalui sistem Bapak Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal *ventura*, ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Taknis), dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui KUB (Kelompok Usaha Bersama), atau KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Menurut *Light, Keller, dan Calhoun* (1989:437-438)(Hutomo,2000) usaha *mikro* dilanda masalah yang sama dari tahun ketahunnya, seperti kekurangan modal karena kesulitan memperoleh kredit usaha dan kerentanan terhadap *fluktuasi* pasar. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pengusaha *mikro* adalah persoalan kesulitan penyediaan modal. Untuk menangani hal ini, pemerintah telah

melakukan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam *UU No.7/1992* tentang Perbankan, kemudian telah diubah terakhir dengan *UU No.10/1998*. Untuk itu pemerintah menyediakan suatu lembaga keuangan yang menangani masalah pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam hal ini usaha *mikro*, yaitu melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kinerja BPR sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk bank, dari tahun ke tahun terus menunjukkan *trend* peningkatan. Dari sisi *aset*, jumlah kredit dan dana pihak ketiga, semuanya menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan. Tahun 2001 jumlah total *aset* BPR baru mencapai Rp 4,731 triliun, namun di akhir tahun 2006 total aset BPR telah meningkat tajam hingga mencapai Rp 23,045 triliun. Di sisi kredit, jumlah kredit yang dikururkan BPR ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2001 juga hanya sebesar Rp 3,619 triliun, dan pada akhir tahun 2006 jumlahnya naik menjadi Rp 16,948 triliun. Pengumpulan dana pihak ketiga juga seperti itu, dari sebesar Rp 4,581 triliun tahun 2001 jumlahnya melonjak menjadi Rp 15,771 triliun pada akhir tahun 2006 (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Berdasarkan hitungan Perbarindo tahun 2007, dengan kredit sebesar Rp 5 juta yang disalurkan BPR kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) akan tercipta satu lapangan kerja baru. Dengan menghitung total kredit yang dialokasikan pada sektor UMKM di akhir tahun 2006, berarti industri BPR secara nasional diasumsikan mampu berperan menciptakan lapangan kerja baru sekitar 3,2 juta. Namun dilain pihak, BPR juga dihadapkan oleh masih maraknya jasa rentenir yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya dan pengusaha

*mikro* pada khususnya. Rentenir secara tidak langsung juga dapat menghambat kinerja BPR itu sendiri bahkan dapat menghancurkan usaha *mikro* yang ada.

Dengan melihat keterangan tersebut maka dilakukanlah penelitian mengenai peran dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha *mikro*, terutama dalam hal pemberdayaannya, karena dengan tumbuh dan berkembangnya usaha *mikro* maka secara langsung memberikan dampak bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru yang menyerap banyak angkatan kerja sehingga BPR merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi rakyat, khususnya dalam bidang permodalan serta penciptaan lapangan kerja baru.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah "Bagaimana peran dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan *mikro* dalam pemberdayaan usaha *mikro* yang ada di Bandar Lampung?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan;

1. Program yang dijalankan BPR dalam memberdayakan usaha *mikro* yang ada di Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan program yang dilakukan BPR tersebut di lapangan.
3. Hambatan apa saja yang dihadapi di dalam pelaksanaannya.

4. Strategi apa yang digunakan oleh BPR dalam mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah :

1. Kepentingan Akademis

Secara obyektif penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Sosial pada umumnya dan pengembangan ilmu Sosiologi Ekonomi pada khususnya.

2. Kepentingan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyediakan informasi tentang kedudukan lembaga keuangan BPR dalam memberdayakan kelangsungan usaha *mikro* di tengah berbagai pengaruh krisis global serta gejolak ekonomi yang terjadi.



